

**ANALISIS INOVASI PELAYANAN PERIZINAN JEMPUT BOLA DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) KABUPATEN SEMARANG**

Ida Wantri Hastuti, Susi Sulandari
Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Analisis inovasi pelayanan perizinan jemput bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dilatar belakangi oleh pelayanan yang masih buruk hal ini dikarenakan jarak antara kecamatan dan letak Dinas yang tergolong jauh sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat terhambat. Inovasi jemput bola adalah solusi dari permasalahan tersebut yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses inovasi jemput bola yang dilakukan serta untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dari inovasi jemput bola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran jelas terkait proses inovasi serta faktor pendorong dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini adalah proses inovasi jemput bola terdiri dari tahap pengetahuan (*knowledge*), tahap bujukan (*persuasion*), tahap keputusan (*decision*), tahap implementasi (*implementation*), tahap konfirmasi (*confirmation*). Faktor pendorong dari inovasi jemput bola adalah dorongan politik, tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi, tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Faktor penghambat terdiri dari keengganan menutup program yang gagal, teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi, tidak ada penghargaan atau insentif, ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan, anggaran jangka pendek dan perencanaan, budaya *risk aversion*. Rekomendasi dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi dalam inovasi jemput bola, pelatihan pegawai DPMPTSP dalam penggunaan teknologi, penambahan sarana dan prasarana serta kegiatan inovasi jemput bola lebih rutin dilakukan agar tercapai pelayanan yang cepat, efisien dan efektif.

Kata Kunci: proses inovasi, inovasi sektor publik, pelayanan publik

ANALYSIS OF INNOVATION OF LICENSING SERVICE OF BALL PICKING AT THE ONE STOP SERVICE AND ONE STOP SERVICE (DPMPTSP) OF SEMARANG REGENCY

ABSTRACT

Analysis of innovation of licensing service of ball picking at the One Stop Service and One Stop Service (DPMPTSP) of Semarang Regency on the back of poor service this is because the distance between subdistrict and location of Dinas are classified so that the service given by the society is hampered. Innovation pick up the ball is the solution of the problem is done by DPMPTSP Semarang regency. The purpose of this research is to explain the process of innovation to pick up the ball as well as to know the driving factors and the inhibiting factors of the innovation pick up the ball. The method used in this study is descriptive qualitative that is expected to provide a clear picture of the innovation process as well as driving factors and inhibiting factors. The result of this research is innovation process of ball pick consist of knowledge stage, persuasion stage, decision stage, implementation stage, confirmation stage. Driving factors of balloon innovation are political impetus, economic pressure and increased efficiency, pressure to improve service quality. While the inhibiting factors consist of reluctance to close down failed programs, existing technology, hampered culture and organizational structuring, no rewards or incentives, inability to face risks and change, short-term budgets and planning, risk aversion culture. The recommendation of this research is the use of technology in balloon innovation, employee training DPMPTSP in the use of technology, the addition of facilities and infrastructure as well as innovation activities more regular pickup ball done in order to achieve fast, efficient and effective service.

Keywords: innovation process, innovation of public sector, public service

Pendahuluan

Sebuah Negara didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Begitu pula dengan Indonesia, tujuan Indonesia salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum (Undang-Undang Dasar 1945). Untuk mencapai tujuan tersebut negara membentuk organisasi yang bernama pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan negara untuk merencanakan, menetapkan tujuan dan sasaran, mengatur, menggerakkan, mengarahkan, dan mensinergikan segenap upaya bersama dalam mencapai tujuan bernegara tersebut.

Pencapaian tujuan negara seperti memajukan kesejahteraan umum, pemerintah secara riil memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Pelayanan publik kini telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia. Perkembangannya pelayanan publik memang selalu aktual untuk diperbincangkan. Pada dasarnya memang manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu berada pada kehidupan setiap manusia. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Ratminto & Winarsih, 2010:19). Posisi masyarakat yang berubah menjadi warga negara membuat para penyedia pelayanan publik tidak hanya memosisikan masyarakat sebagai konsumen, melainkan lebih jauh masyarakat juga dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam setiap pengambilan

keputusan ini memungkinkan bagi penyedia layanan publik untuk lebih responsif.

Hal utama yang menjadi indikator bahwa penyedia layanan publik telah responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Konsep inovasi, belum berkembang secara maksimal pada sektor publik. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kesempatan bagi Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur sendiri pembentukan, kedudukan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah dan kemampuan daerah sehingga dapat berbeda antara Daerah Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya. Sebab tujuan pemberian otonomi daerah dan keberadaan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan dan penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, ekonomis dan demokratis.

Wiwandari, dkk (2013:2) dalam jurnalnya yang berjudul *Kajian Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang* menyatakan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan daya saing antar daerah. Inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kunci dalam peningkatan daya saing antar daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Inovasi dapat berupa pembaharuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada dasarnya merupakan agenda nasional sesuai dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJN) 2005-2025 dan UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Setiap daerah di Indonesia saling bersaing di bidang inovasi guna mencapai kesejahteraan rakyat, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) juga saling berlomba melakukan terobosan-terobosan yang inovatif. Begitu pula dengan Kabupaten Semarang beserta instansi yang ada di Kabupaten Semarang di bidang pelayanan perizinan. Pelayanan Perizinan di Kabupaten Semarang belum memenuhi indikator pelayanan publik yang prima. Pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang masih terbilang sangat terbatas, dimana pemohon harus datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dalam mengurus segala bentuk perizinan. Pemohon yang akan mengurus perizinan pun terkadang masih terhambat oleh faktor masyarakat yang datang ke DPMPTSP dengan membawa dokumen yang kurang lengkap untuk memenuhi persyaratan perizinan. Masyarakat/pemohon setidaknya datang 2 sampai

3 kali dalam mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang yang berada di pusat kota, tak jarang membuat masyarakat yang tinggal di Desa merasa enggan untuk mengurus perizinan lantaran lokasi yang cukup jauh dan tidak jarang dapat diselesaikan dalam satu kali waktu. Keterjangkauan yang menjadi salah satu aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan UU No 29 Tahun 2009 Pasal 4 menjadi tidak dapat tercapai dengan baik. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dapat dikatakan masih sangat kurang. Selain itu, ketidakjelasan waktu dan persyaratan kelengkapan dokumen yang tidak dapat diakses oleh masyarakat juga menjadi salah satu kelemahan pelayanan yang kurang maksimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dengan jumlah pemohon masih ada selisih yang lumayan banyak. Jumlah ijin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang tergolong fluktuatif, pada tahun 2013 jumlah ijin yang telah diterbitkan mencapai 94%, tahun 2014 79%, 2015 83%. Pada tahun 2013 jumlah pemohon yang terdaftar di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang sebanyak 1430 pemohon, namun pada tahun yang sama jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dalam data strategis Kabupaten Semarang menunjukkan angka 1348. Terdapat selisih 82 antara jumlah pemohon dan jumlah perizinan yang diterbitkan. Pada tahun 2014 jumlah pemohon yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang sebanyak 1855 pemohon, namun pada tahun yang sama jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dalam data strategis Kabupaten Semarang menunjukkan angka 1472. Terdapat selisih 383 antara jumlah pemohon dan jumlah perizinan yang diterbitkan. Pada tahun 2015 jumlah pemohon yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang sebanyak 2074 pemohon, namun pada tahun yang sama jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dalam data strategis Kabupaten Semarang menunjukkan angka 1712. Terdapat selisih 362 antara jumlah pemohon dan jumlah perizinan yang diterbitkan. Dari tahun ke tahun belum ada pencapaian yang baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang,

dimana tiap tahunnya pasti ada selisih yang cukup besar antara jumlah pemohon dan jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Pelayanan Perizinan di Kabupaten Semarang masih belum merata di seluruh Kabupaten Semarang. Kesenjangan untuk mendapatkan pelayanan terutama pelayanan dasar sangat dirasakan oleh kecamatan kecamatan yang berada jauh dari pusat kota Kabupaten Semarang yang terletak di Ungaran. Kecamatan Kaliwungu merupakan kecamatan dengan jarak terjauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Semarang yang terletak di Ungaran. Kecamatan Kaliwungu berada 49 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang sehingga untuk mengurus perizinan dasar masyarakat kecamatan Kaliwungu harus menempuh jarak kurang lebih 49 KM. Kecamatan Susukan berada 46 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, kemudian disusul dengan Kecamatan Tengaran dengan jarak tempuh 38 KM. Jarak tempuh dari Kecamatan ke DPMPTSP yang jauh berakibat pada kemauan masyarakat untuk melakukan perizinan dasar ke DPMPTSP Kabupaten Semarang.

Melihat permasalahan pelayanan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Semarang, mencoba untuk memudahkan masyarakat dengan membuat sebuah terobosan atau inovasi. Terobosan atau inovasi yang dibuat

oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Semarang adalah dengan Jemput Bola. Jemput bola ini diharapkan dapat mengurangi jumlah usaha atau bangunan illegal yang ada di Kawasan Kabupaten Semarang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Perizinan Jemput Bola Keliling pada Tahun 2015 di Kabupaten Semarang dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan jemput bola di 19 (sembilan belas) Kecamatan se Kabupaten Semarang (Surat Keputusan Kepala DPMPTSP NOMOR : 510.4/ /2015).

Tujuan penelitian merupakan suatu yang akan dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis proses inovasi program Jemput Bola dalam pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong inovasi program Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Kerlinger teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan hubungan antar variabel, dengan tujuan

menjelaskan dan memprediksi gejala itu (dalam Pasolong, 2011:9). Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh (Keban ,2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi

tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

3. Good Governance

Koiman mengemukakan, *Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (dalam Sedarmayanti, 2009:273). *Governance* merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum. Menurut Mardiasmo (2005:114) orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, yaitu perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan uang dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan (*service*) menurut *American Marketing Association*, seperti yang dikutip oleh Donald bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produksi fisik (dalam Hardiyansyah, 2011:10).

5. Inovasi Pelayanan Publik

Secara umum inovasi seringkali diterjemahkan sebagai penemuan baru. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi di sektor swasta atau di sektor industri. Sedangkan, inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan berkualitas, murah dan terjangkau (Wijayanti, 2008:42).

Pembahasan

1. Proses Inovasi Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

a. Tahap Pengetahuan (*Knowledge*)

Pada tahap ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dimulai dari proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang terkait perijinan dasar sangat kompleks. Dimulai dari kondisi geografis (jarak antara masyarakat dengan DPMPTSP Kabupaten Semarang yang terletak di Pusat Kota Ungaran), pelayanan yang kurang optimal, dan kesadaran masyarakat masih rendah dalam melakukan perijinan terutama perijinan dasar.

Latar belakang inovasi jemput bola adalah jarak antara kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang dengan lokasi DPMPTSP yang cukup jauh sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan sesuai dengan prosedur yang

ada. Keterjangkauan atau jarak menjadi masalah utama sehingga berimbas pada permasalahan yang lain dalam mengurus perijinan dasar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Diperlukan sebuah inovasi untuk mengatasi keterjangkauan atau jarak masyarakat dalam mengurus perizinan dasar dengan kata lain bagaimana caranya mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat sehingga semua elemen masyarakat dapat mengurus perizinan tanpa kendala. Dengan permasalahan yang ditemui tersebut DPMPTSP Kabupaten Semarang mencoba mencari solusi dan jalan yang mampu menjawab dari permasalahan tersebut.

b. Tahap Bujukan (*Persuasion*)

Pada tahap bujukan (*Persuasion*) ini diadakan seleksi informasi yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang, dimana adanya gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan inovasi sampai konsekuensi inovasi yang nantinya dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang. Pada tahapan ini permasalahan sudah menemukan jalan keluar atau solusi. Dalam hal ini permasalahan yang semula keterjangkauan atau jarak menjadi sebuah masalah yang besar sehingga berimbas

pada pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang yang belum maksimal. Dengan permasalahan tersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang menciptakan ide inovasi

Inovasi yang mampu menjawab permasalahan tersebut adalah inovasi jemput bola. Dimana pihak DPMPTSP Kabupaten Semarang yang akan mendatangi masyarakat untuk mengurus perizinan dasar. Sehingga masyarakat tidak mempermasalahakan lagi jarak yang jauh dalam mengurus perizinan dasar tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang pada tahapan bujukan (*persuasion*) ini menghasilkan solusi inovasi jemput bola untuk mengatasi masalah yang ada serta sudah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang NOMOR : 510.4/

/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan pelayanan perizinan jemput bola keliling tahun 2015 yang menjadikan inovasi jemput bola ini sudah mendapatkan persetujuan dari keseluruhan staff yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang.

c. Tahap Keputusan (*Decision*)

Pada tahapan inovasi ini adalah Tahap Keputusan (*Decision*). Pada tahapan ini, DPMPTSP Kabupaten Semarang sudah mengeluarkan keputusan inovasi serta sudah berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk pelaksanaan inovasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang sudah berkoordinasi dengan Pegawai Kecamatan di Kabupaten Semarang. Di Kabupaten Semarang terdapat 19 kecamatan yang tersebar diseluruh Kabupaten Semarang. Tahap bujukan (*persuasion*) ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak yang berkaitan dengan inovasi jemput bola perizinan dasar ini. Koordinasi dilakukan DPMPTSP dengan kecamatan-kecamatan yang terkait dalam pelaksanaan inovasi jemput bola, disini ada 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang yaitu kecamatan Getasan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ambarawa,

Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bringin, Kecamatan Bancak, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Semarang di kecamatan kecamatan berisi tentang sosialisasi peraturan tentang perizinan serta mekanisme dari inovasi jemput bola yang akan dilaksanakan di kecamatan yang bersangkutan. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mengedukasi pegawai kecamatan yang nantinya mampu mengedukasi masyarakat di kecamatan tersebut. Sehingga pada akhirnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sosialisasi ini juga merangkul pegawai kecamatan untuk mengajak masyarakat pada kegiatan inovasi jemput bola yang akan diadakan di kecamatan tersebut. Sehingga, banyak masyarakat yang datang dan antusias dalam mengurus perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Pada tahapan inovasi ini adalah Tahap Implementasi (*Implementation*). Pada tahapan ini, kegiatan inovasi jemput bola sudah dijalankan atau dikerjakan. Setelah dilakukannya koordinasi dengan

pihak yang terkait maka pelaksanaan inovasi jemput bola segera dilakukan untuk pertama kalinya. Kegiatan inovasi secara garis besar melibatkan kecamatan hanya sebatas perantara antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang dan masyarakat di kecamatan tersebut. Pada tahapan ini sudah dilakukannya pelaksanaan kegiatan dimana kecamatan sebagai perantara antara masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. Pelaksanaan atau implementasi ini dilakukan karena koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kabupaten Semarang) dan Kecamatan yang terkait.

Pelaksanaan inovasi jemput bola yang diawali dengan sosialisasi dari pihak DPMPTSP ke Kecamatan yang terkait yang berisi tentang dasar hukum jemput bola, mekanisme serta tujuan dan sasaran dari inovasi jemput bola ini. Selanjutnya kegiatan dilakukan oleh pihak kecamatan untuk menyampaikan informasi ke pihak masyarakat bahwa akan diadakannya jemput bola di kecamatan tersebut. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk melakukan perizinan yang dilakukan DPMPTSP kabupaten Semarang. Kegiatan terakhir

yaitu pelaksanaan jemput bola di kecamatan tersebut yang dilakukan langsung oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Semarang. Kegiatan jemput bola berlangsung selama pukul 09.00 – 12.00 WIB (kurang lebih 3 jam). Kegiatan jemput bola ini dilakukan dengan jarak kurang lebih 2 minggu dari sosialisasi oleh DPMPTSP ke pihak pegawai kecamatan.

e. Tahap Konfirmasi (*Confirmation*)

Tahap Konfirmasi (*Confirmation*) adalah tahapan terakhir dari sebuah inovasi yang diungkapkan oleh **Rogers**. Tahapan ini adalah keputusan akhir bahwa sebuah inovasi akan dilaksanakan kembali atau berhenti dengan melihat respon dari masyarakat, kesulitan sebuah inovasi bagi penggunaanya serta ketepatan sasaran sebuah inovasi ini.

Jemput bola merupakan sebuah inovasi yang tepat sasaran dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang merasa terbantu dan tingkat kesukaran jemput bola yang dinilai sedikit. Sehingga inovasi jemput bola ini akan terus dilaksanakan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan ke pengguna dalam hal ini masyarakat. Pelaksanaan inovasi jemput bola ini tidaklah sulit untuk dilaksanakan, respon masyarakatpun sangat besar untuk kelanjutan dari inovasi jemput bola ini.

Sehingga inovasi ini layak untuk dilanjutkan lagi oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Inovasi

a. Faktor Pendorong Inovasi

1) Dorongan Politik

Dorongan politik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Dengan adanya kesamaan visi dan misi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Pemerintah daerah selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada DPMPTSP Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi yang dilakukan. Dengan adanya terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang mampu menjawab persoalan yang ada serta mampu mewujudkan visi dan misi yang diusung oleh kedua belah

pihak yaitu pihak pemerintah daerah dan DPMPTSP Kabupaten Semarang. Pemda memberikan bantuan dan DPMPTSP melakukan inovasi tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Semarang memberikan dukungan dan bantuan untuk inovasi yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Semarang dengan memberikan bantuan berupa penambahan anggaran dan 1 buah unit mobil untuk pelaksanaan jemput bola. Dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang ini, inovasi jemput bola dapat bekerja lebih maksimal. Mobil ini mampu menjangkau 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Mobil ini merupakan bukti nyata dukungan dari Pemda Kabupaten Semarang. Dengan bantuan tersebut DPMPTSP mampu menjalankan inovasi jemput bola dengan baik dan dapat memaksimalkan inovasi tersebut. Pihak DPMPTSP dan Pemda juga memiliki kesamaan visi dan misi diantaranya yaitu memberikan pelayanan yang mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Dengan adanya inovasi jemput bola ini diharapkan mampu

mewujudkan visi dan misi tersebut untuk memberikan pelayanan yang mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

2) Tekanan Ekonomi dan Peningkatan Efisiensi

Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi menjadi salah satu faktor pendorong proses inovasi. Maksud dari tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi adalah pengurangan biaya dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan. Tekanan ekonomi biasanya muncul dari internal/dorongan internal untuk pengurangan anggaran yang tidak dibutuhkan seperti pelayanan yang *paperless*. Dan peningkatan efisiensi datang dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat dan tidak bertele-tele.

Inovasi jemput bola ini juga digunakan untuk mengurangi anggaran pada proses perizinan dasar. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk mencetak dokumen yang banyak (blangko yang rangkap 3) dapat digunakan untuk keperluan yang lain yang lebih penting. Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi menjadi salah satu faktor pendorong

inovasi jemput bola di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Dengan inovasi jemput bola ini dapat mengurangi anggaran yang tidak diperlukan serta meningkatkan efisiensi pembuatan perizinan dasar di DPMPTSP Kabupaten Semarang.

3) Tekanan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Inovasi dapat terwujud apabila ada tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai pihak. Dengan adanya kritikan dan penilaian dari masyarakat kepada DPMPTSP Kabupaten Semarang terkait dengan pelayanan maka akan memacu semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan perizinan terutama perizinan dasar. Kritik dari masyarakat adalah terkait jarak dan waktu yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kabupaten Semarang dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat pada umumnya.

Pihak DPMPTSP Kabupaten Semarang menyediakan tempat khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat atau instansi yang melakukan pengaduan di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Semarang terbuka dengan kritik dan saran yang disampaikan

masyarakat demi kemajuan pelayanan yang diberikan, serta menjadi evaluasi pelayanan yang telah diberikan selama ini oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang. Dengan adanya kritik dari masyarakat ini DPMPTSP mencari solusi terbaik untuk kebaikan semua pihak.

b. Faktor Penghambat Inovasi

1) Keengganan Menutup Program yang Gagal

Keengganan menutup program yang gagal merupakan salah satu faktor penghambat inovasi, karena jika program yang dirasa tidak mencapai hasil yang diharapkan dibiarkan begitu saja hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan inovasi dan pemborosan anggaran karena terus membiayai program yang dianggap tidak berdampak atau gagal dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam pelaksanaan inovasi jemput bola, DPMPTSP Kabupaten Semarang sendiri merasa masih ada program yang gagal, dan ada beberapa rencana program yang belum bisa dilaksanakan atau diimplementasikan.

DPMPTSP Kabupaten Semarang masih ada program gagal yang masih dijalankan seperti pelayanan online yang dirasa gagal karena kurangnya

SDM yang kompeten. Sedangkan, program yang belum terlaksana yaitu pelayanan perizinan yang membutuhkan waktu 1 hari seperti pelayanan perpanjangan SIM.

2) Teknologi Ada, Terhambat Budaya dan Penataan Organisasi

Teknologi dan budaya organisasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses inovasi. Dengan terhambatnya budaya organisasi dan kurangnya kelengkapan teknologi memungkinkan menjadi salah satu faktor gagalnya pelaksanaan proses inovasi. DPMPTSP Kabupaten Semarang sudah dilengkapi dengan teknologi hanya saja SDM yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang masih terbatas. Teknologi sudah diterapkan dalam pelayanan inovasi jemput bola namun masih terkendala oleh SDM yang kurang memadai dan kurang kompeten untuk menjalankan teknologi tersebut.

Sehingga dengan teknologi yang sudah ada namun kurangnya SDM untuk mengelola teknologi yang ada untuk meningkatkan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang.

Hal ini tentu saja menghambat proses inovasi jemput bola yang dilakukan.

3) Tidak Ada Penghargaan atau Insentif

Penghargaan atau insentif merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya sebuah inovasi. Karena dengan diadakannya pemberian penghargaan atau insentif masyarakat dan pegawai dapat termotivasi untuk menjalankan inovasi yang sudah diterapkan yaitu inovasi jemput bola DPMPTSP Kabupaten Semarang. Penghargaan atau insentif kepada pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang untuk inovasi jemput bola ini sudah ada namun nominalnya tidaklah besar.

Penghargaan atau insentif yang ada di DPMPTSP Kabupaten Semarang sudah ada namun sangat kecil, sehingga tidak mampu mendorong semangat atau antusias pegawai DPMPTSP dalam melakukan inovasi jemput bola ini.

4) Ketidakmampuan Menghadapi Resiko dan Perubahan

Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan adalah salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses

inovasi. Para pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang dituntut untuk mampu menghadapi resiko dan perubahan dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik terkait memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum di Kabupaten Semarang.

Pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang dinilai belum mampu menghadapi resiko dan perubahan. Hal ini terlihat dari perilaku pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan perizinan. Pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang belum mampu mnegimbagi kemajuan teknologi sekarang. Dalam menghadapi resiko dan perubahan pegawai DPMPTSP dianggap belum mampu dan harus selalu siap untuk menghadapi resiko dan perubahan tersebut.

5) Anggaran Jangka Pendek dan Perencanaan

Salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah inovasi adalah anggaran jangka pendek dan perencanaan. Dengan adanya perencanaan yang baik maka anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik dan dapat membiayai pelaksanaan inovasi secara efektif dan efisien.

DPMPTSP Kabupaten Semarang selalu melakukan perencanaan terhadap anggaran jangka pendek sehingga inovasi jemput bola terkait pelayanan dasar dapat berjalan dengan baik. Anggaran yang digunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan inovasi jemput bola. Untuk penambahan sarana prasarana DPMPTSP Kabupaten Semarang belum mempunyai anggaran, karena anggaran di DPMPTSP Kabupaten Semarang tergolong sedikit.

Pelaksanaan inovasi jemput bola ini DPMPTSP Kabupaten Semarang sudah melakukan anggaran jangka pendek dan perencanaan. Semua anggaran yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Semarang untuk inovasi jemput bola masih terbatas sehingga masih digunakan untuk pelaksanaan jemput bola sepenuhnya.

6) Budaya *Risk Aversion*

Risk Aversion (menghindari resiko) merupakan budaya yang selalu berusaha untuk menghindari suatu resiko yang mungkin akan terjadi. Di dalam proses inovasi, budaya ini sangat mempengaruhi ketidak berhasilan suatu inovasi, karena mereka tidak siap untuk meninggalkan kebiasaan lama mereka dan melakukan

hal-hal baru atau terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang ada yang antusias untuk meninggalkan budaya ini, namun tidak banyak yang enggan untuk meninggalkan budaya ini. Pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang sebagian sudah ada yang antusias untuk meninggalkan budaya menghindari resiko. Contohnya pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang sudah memberikan masukan untuk kegiatan jemput bola ini dengan skala yang lebih besar, kalau selama ini masih perizinan dasar sekarang ditambah perizinan yang lain dan penggunaan teknologi biar lebih efisien. Namun, tidak banyak dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang yang enggan untuk meninggalkan budaya ini, lebih senang dengan keadaan yang sekarang. Tidak mau belajar menggunakan teknologi untuk pelayanan perizinan. Banyak pegawai yang ragu dan enggan untuk membantu kegiatan jemput bola ini karena harus ke kecamatan untuk menjemput pemohon. Namun saat ini pegawai DPMPTSP Kabupaten Semarang juga sudah mulai antusias, pegawai DPMPTSP Kabupaten

Semarang banyak yang mengusulkan untuk jemput bola ini menambah jenis perizinan. Menggunakan teknologi untuk proses yang lebih cepat dan efisien. Dengan jemput bola ini pekerjaan lebih ringan karena pekerjaan jadi lebih fokus, bisa langsung direkap.

Kesimpulan

Inovasi Jemput Bola dalam pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang terdiri dari 5 tahapan utama yaitu tahap pengetahuan (*knowledge*), tahap bujukan (*persuasion*), tahap keputusan (*decision*), tahap implementasi (*implementation*), tahap konfirmasi (*confirmation*). Tahap pengetahuan (*knowledge*) yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, tahapan bujukan (*persuasion*) yaitu menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah. Tahap keputusan (*decision*) yaitu dikeluarkannya surat keputusan menjalankan program inovasi, tahap implementasi (*implementation*) yaitu pelaksanaan program inovasi dan tahapan konfirmasi (*confirmation*) yaitu keputusan apakah inovasi akan dihentikan atau dijalankan lagi.

Ada beberapa pendorong dan penghambat inovasi program Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Faktor pendorong inovasi jemput bola terdiri dari dorongan politik, tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi, tekanan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dorongan politik yaitu kesamaan visi dan misi antara pemerintah daerah dan DPMPTSP Kabupaten Semarang. Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi adalah pengurangan anggaran dan kecepatan proses perizinan serta tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu tuntutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan dari DPMPTSP Kabupaten Semarang. Faktor penghambat proses inovasi program inovasi jemput bola adalah keengganan menutup program yang gagal, teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi, tidak ada penghargaan atau insentif, ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan, anggaran jangka pendek dan perencanaan, budaya *risk aversion*. Keengganan menutup program yang gagal yaitu pelayanan berbasis online. Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi yaitu teknologi ada namun pegawai DPMPTSP tidak mampu

memanfaatkan teknologi tersebut. Tidak ada penghargaan atau insentif yaitu kecilnya anggaran yang digunakan untuk memberikan insentif kepada pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan inovasi program jemput bola. Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan yaitu belum mempunyai pegawai DPMPTSP dalam menyelesaikan persoalan pelayanan perizinan. Anggaran jangka pendek dan perencanaan yaitu anggaran yang terbatas sehingga tidak mampu menambah sarana prasana. Budaya *risk aversion* yaitu pegawai DPMPTSP masih ada yang enggan untuk meninggalkan kebiasaan lama mereka dan melakukan hal-hal baru atau terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Daftar Pustaka :

- Albrow, M. 2004. Birokrasi. Penerjemah : M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Barnsley, J Dan D. Ellis. 1992. Research For Change Participatory Action Research For Community Groups. Canada : the Woman's Research Centre.
- Everett M. Rogers. 1983. Diffusion of Innovations. London: The Free Press.
- Fontana, Avanti. 2011. Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai. Jakarta : Cipta Inovasi Sejahtera.
- Ganie Rochman. 2000. Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dan Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara yang Baik. Jakarta: Penerbit Komna HAM.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ibrahim, Amin. (2013). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bina Aksara.

- Keban, Y. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta
- McLeod, R. dan Schell, G.P. 2007, Management Information System (edisi ke- 10), Pearson Prentice Hall, New Jersey
- Moch.Nazir. (2003), Metode Penelitian, Salemba Empat, Jakarta,63.
- Mosley,Mark. 2008. Dictionary of Data Management. Technics Publications.
- Muluk, Khairul. (2008). Knowledge Management. Malang: Bayumedia Publishing.
- Noor, Irwan. (2013) Desain Inovasi Pemerintah Daerah. Malang, UB Press.
- Osborne, D. dan Ted Gaebler. 2000. Mewirauahakan Birokrasi. Cetakan Keenam. Penerjemah : Abdul Rosyid. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Pasolong, H. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2010). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins Stephen P. dan Coulter, Mary K. 2005. Management. Jakarta : PT Indeks kelompok Gramedia.
- Sedarmayanti.2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
- Suwarno, Yogi. (2008) Inovasi di Sektor Publik. Jakarta, STIA-LAN Press.
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Terry, G.R., dan Leslie W. Rue. 2013. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan Keempatbelas. Jakarta : Bumi Aksara.
- Turban, E, 2005, Decision Support Systems and Intelligent Systems Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1, Andi, Yogyakarta.
- Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. Manajemen. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia
- Wiratha, I Made, 2006 . Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi offset.
- UUD 1945